



Tantangan Terhadap Stabilitas Politik dan Sosial Indonesia: Dampak Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Neysa Naila¹, Shafina Imaniary², Aulia Ramadhanty³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak: Penelitian ini membahas dampak kontroversi yang ditimbulkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap stabilitas politik dan sosial Indonesia. HTI, yang mengusung ideologi negara Islam, telah memicu perdebatan terkait penerapan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multikultural. Pembubaran organisasi ini oleh pemerintah Indonesia menjadi refleksi atas tantangan dalam mengelola keragaman ideologi dan agama, serta ancaman terhadap integrasi sosial dan stabilitas negara. Melalui analisis ini, diperoleh pemahaman bahwa pentingnya penerapan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga keharmonisan antar kelompok agama dan ideologi menjadi kunci dalam mencegah konflik.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Stabilitas Politik, Keragaman Ideologi, Pancasila

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1974>

*Correspondence: Aniqotul Ummah

Email: aniqotul.ummah@upnvj.ac.id

Received: 15-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 03-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study discusses the impact of the controversy surrounding Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) on Indonesia's political and social stability. HTI, which advocates for an Islamic state ideology, has sparked debates regarding the role of religion in the nation's political and social life, particularly in a multicultural country like Indonesia. The government's dissolution of the organization reflects the challenges in managing ideological and religious diversity, as well as the potential threats to social integration and national stability. This analysis emphasizes the importance of applying Pancasila as the foundation of the state to maintain harmony among different religious and ideological groups and prevent conflicts.

Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia, Political Stability, Ideological Diversity, Pancasila.

Pendahuluan

Konsep negara sebagai entitas kolektif yang dibentuk melalui konsensus masyarakat menjadi landasan untuk mencapai tujuan bersama, seperti kemakmuran, keamanan, dan ketertiban. Ideologi memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum, politik, dan kebijakan publik suatu negara. Ideologi tidak hanya sekadar kumpulan gagasan, tetapi juga merupakan sistem nilai dan keyakinan yang menjadi dasar kehidupan bernegara dan identitas nasional. Dalam konteks negara modern, ideologi berfungsi untuk menyatukan rakyatnya. Berbagai ideologi seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan teokrasi memiliki implikasi yang beragam terhadap tatanan politik, sosial, dan ekonomi. Misalnya, demokrasi menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik,

sementara liberalisme mengutamakan kebebasan individu (Budiardjo, 2020). Di sisi lain, sosialisme berfokus pada penghapusan kelas sosial, sedangkan teokrasi menjadikan prinsip agama sebagai dasar kekuasaan politik.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menyatukan perbedaan tersebut. Pancasila dirancang untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman, menjadikannya landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, munculnya kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang mengusung ideologi khilafah sebagai alternatif dari Pancasila, memicu ketegangan di masyarakat. Ideologi HTI menimbulkan tantangan besar terhadap pluralisme dan integrasi nasional. Sebagai respons, pemerintah Indonesia membubarkan HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kesatuan bangsa, namun juga memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial.

Pembubaran HTI menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara ideologi, agama, dan negara di Indonesia. Tantangan utama terletak pada bagaimana negara mengelola keberagaman ideologi tanpa mengorbankan nilai-nilai inklusivitas. Keputusan untuk membubarkan HTI membawa dampak yang luas, termasuk potensi munculnya polarisasi sosial di masyarakat (Rousseau, 1968). Hal ini mengundang pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam mencegah konflik dan memastikan kohesi sosial, terutama di tengah masyarakat yang multikultural. Selain itu, interaksi antara ideologi keagamaan dengan norma sosial yang berlaku memengaruhi kebijakan publik, menciptakan ruang diskusi mengenai bagaimana negara dapat memitigasi ketegangan ideologis tanpa menimbulkan diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembubaran HTI terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut serta implikasi jangka panjangnya terhadap pluralisme dan toleransi beragama. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara ideologi, agama, dan negara dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan di tengah keberagaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada dampak kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dirancang untuk memastikan keterulangan dengan memberikan penjelasan rinci tentang proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, serta telaah pustaka yang mencakup artikel, laporan, dan publikasi terkait HTI beserta implikasinya terhadap masyarakat. Metodologi yang sudah mapan dalam penelitian kualitatif diterapkan dan dirujuk sebagaimana mestinya, sementara protokol baru, khususnya dalam menganalisis persepsi publik terhadap pembubaran HTI, dijelaskan secara rinci untuk mendukung validitas dan replikasi hasil penelitian (Sugiyono, 2015).

Aspek etika dalam penelitian ini diperhatikan dengan cermat, mengingat sensitivitas topik yang melibatkan dinamika sosial dan politik. Penelitian ini mematuhi standar etika, dengan menjamin anonimitas dan kerahasiaan semua peserta dalam diskusi kelompok terfokus dan observasi (Sugiyono, 2019). Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen intervensi pada manusia atau hewan, sehingga tidak memerlukan kode persetujuan etik. Hasil penelitian dirancang untuk dapat diakses secara publik, memastikan transparansi, dan mendukung penelitian lanjutan di bidang ini. Semua materi, data, dan protokol terkait publikasi ini tersedia berdasarkan permintaan dan akan disimpan dalam basis data publik sebelum publikasi, dengan nomor akses yang akan disediakan selama proses tinjauan.

Hasil dan Pembahasan

Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berakar pada gagasan Islam politik yang bercita-cita mendirikan khilafah atau pemerintahan Islam global, dengan tujuan menggantikan sistem pemerintahan sekuler dengan sistem khilafah yang diyakini sesuai dengan hukum syariah. Sebelum dibubarkan pada tahun 2017, HTI menunjukkan pengaruh signifikan terhadap wacana politik Islam di masyarakat, dengan menentang sistem politik demokrasi dan ideologi Pancasila melalui pendekatan dakwah dan aktivisme. Meskipun organisasi ini telah dibubarkan, ideologi yang mereka bawa masih hidup di kalangan sebagian masyarakat dan terus memengaruhi dinamika politik Indonesia (Heriansyah et al., 2022). Gagasan tentang khilafah ini menarik bagi sejumlah umat Muslim yang merasa bahwa sistem demokrasi tidak mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan politik secara mendalam. Bagi mereka, konsep khilafah menawarkan harapan akan sistem yang adil dan berbasis nilai-nilai Islam. Pandangan ini menyebabkan polarisasi di masyarakat, membelah kelompok yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara dengan mereka yang menganggap khilafah sebagai solusi alternatif, yang pada gilirannya memperburuk perpecahan, terutama antara kelompok moderat yang mendukung negara dan mereka yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan.

Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki dampak yang sangat besar terhadap kohesi sosial di masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perpecahan antar kelompok yang mendukung dan menentang ideologi yang dibawa oleh organisasi tersebut. Sebagian kelompok yang mendukung HTI menganggap bahwa ideologi khilafah yang mereka usung dapat memberikan solusi atas masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang mereka anggap tidak terselesaikan dengan sistem demokrasi yang ada. Mereka percaya bahwa khilafah, yang diinginkan HTI, bisa membawa tatanan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam (Ismail, 2019). Namun, kelompok yang menentang HTI memandang ideologi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan kesatuan negara, terutama dengan konsep khilafah yang dianggap bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Perbedaan pandangan ini mengarah pada polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, memecah hubungan sosial antar individu maupun kelompok. Ketegangan ini memperburuk kepercayaan antara mereka yang mendukung dan yang menentang HTI, sehingga menyebabkan friksi sosial yang mendalam, yang tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi, tetapi juga mencakup institusi-institusi formal dan informal dalam masyarakat.

Polarisasi yang disebabkan oleh kontroversi HTI juga mempengaruhi interaksi sosial sehari-hari dan struktur sosial yang ada. Beberapa individu dan kelompok yang terasosiasi dengan HTI mulai merasakan diskriminasi, di mana mereka sering kali dicap sebagai kelompok yang tidak setia pada negara, bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap integrasi sosial (Zamzamy, 2020). Stigmatisasi ini membuat integrasi sosial yang harmonis semakin sulit tercapai, karena individu yang merasa terpinggirkan merasa semakin terisolasi dari masyarakat luas. Dalam konteks ini, banyak individu yang merasa bahwa pandangan mereka tidak diterima oleh masyarakat mayoritas, yang semakin memperlebar jurang pemisah antar kelompok (Jamilah, 2015). Selain itu, ketegangan sosial ini juga dapat memperburuk hubungan antara kelompok yang berseberangan, mengurangi ruang untuk dialog yang konstruktif dan kerja sama lintas kelompok. Jika ketegangan ini dibiarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang baik, maka perpecahan sosial yang lebih besar dapat terjadi, yang akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perbedaan dan meningkatkan kecenderungan untuk mendominasi atau menyingkirkan kelompok lain (Ridwan, 2019).

Dampak jangka panjang dari kontroversi HTI terhadap kohesi sosial juga akan sangat terasa pada generasi muda yang tumbuh dalam atmosfer ketegangan ini. Generasi muda yang mengalami langsung perdebatan ini mungkin akan membawa sikap skeptis terhadap pluralisme dan toleransi beragama yang selama ini dijunjung tinggi di Indonesia. Ketika mereka terpapar pada polarisasi yang terjadi, mereka dapat mengalami kebingungan dalam memahami bagaimana cara menjaga keberagaman dalam negara yang plural. Jika tidak ada usaha untuk menguatkan pemahaman tentang pentingnya pluralisme dan toleransi di kalangan generasi muda, ada risiko nilai-nilai inklusivitas akan tergeser oleh sikap eksklusivisme. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan yang lebih besar di masa depan, yang pada akhirnya dapat merusak solidaritas sosial yang diperlukan untuk menjaga kesatuan bangsa (Lutfi et al., 2019). Tanpa langkah-langkah proaktif untuk mengedepankan pendidikan dan dialog yang mengutamakan saling pengertian, masyarakat Indonesia berisiko kehilangan kemampuan untuk merayakan keberagaman yang telah menjadi identitas bangsa ini.

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keragaman ideologi dan agama di Indonesia yang berakar pada sejarah pembentukan negara (Rismawati et al., 2021). Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengakomodasi keragaman ideologi dan agama, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara berbagai pandangan yang ada. Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, menggabungkan nilai-nilai demokrasi dan teisme yang mengakomodasi perbedaan paham, termasuk antara Islam dan nasionalisme. Namun, dalam praktiknya, keragaman ini sering kali menimbulkan ketegangan sosial, terutama terkait dengan perbedaan pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara. Dalam hal ini, muncul perbedaan pandangan mengenai implementasi Islam, yang dibagi menjadi pandangan formalistik yang lebih eksklusif dan sering kali mendominasi kebijakan pemerintah, serta pandangan substansial yang lebih inklusif dan dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara agama, negara, dan masyarakat.

Ketegangan ini menjadi lebih nyata ketika kelompok seperti HTI berusaha untuk memperjuangkan ideologi yang lebih tegas mengenai negara Islam, yang berbenturan dengan prinsip negara demokrasi Pancasila, dan pada akhirnya memicu pembubaran sebagai respons terhadap potensi disintegrasi dan konflik sosial yang dapat timbul.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mengelola keragaman ideologi dan agama di negara yang multikultural ini. Keragaman pandangan, terutama terkait hubungan antara agama dan negara, telah menjadi sumber ketegangan yang signifikan. Perbedaan pandangan mengenai penerapan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari sisi formalistik maupun substansial, turut berkontribusi pada ketegangan sosial yang ada. Pembubaran HTI, sebagai kelompok yang mengusung ideologi negara Islam, merupakan respons pemerintah terhadap potensi ancaman terhadap integrasi sosial dan stabilitas negara yang berdasarkan pada Pancasila.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila, yang lahir dari konsensus para pendiri bangsa, menjadi pedoman yang seharusnya mampu menyeimbangkan kepentingan ideologi dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan mencegah konflik yang timbul akibat perbedaan tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperkuat pemahaman terhadap Pancasila menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Referensi

- Budiardjo, M. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gram. Gramedia Pustakama.
- Heriansyah, H., Rofii, M. S., & Imdadun, M. (2022). Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 9(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.74246>
- Ismail, M. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Teori Negara Hukum. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4414>
- Jamilah. (2015). Gerakan Hizbut Tahrir di Pare-Pare (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiuddin al-Nabhani. . *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1).
- Lutfi, M., Sobari, A., & Rofi'ah, R. (2019). Konsep Pembinaan Hizbut Tahrir dan Dampaknya Terhadap Akhlak Remaja. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32832/komunika.v5i1.5416>

-
- Ridwan. (2019). Islam Transnasional dan Ancaman Radikalisme di Kota Jayapura, Papua: Studi Awal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kelompok Salafy Jafar Umar Thalib. *AT-Ta'DIB : Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 3(1).
- Rismawati, S. D., Qomariyah, S., Devy, H. S., Maisyal, N., & A'yun, Q. (2021). The Legal Politics of Religious Moderation in Indonesia: Responsive or Repressive? *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4).
- Rousseau. (1968). *The Social Contract*. Penguin Books.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Zamzamy, A. (2020). Model Negara Menurut Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah di Indonesia. *Global and Policy Journal of International Relations*, 3(02). <https://doi.org/10.33005/jgp.v3i02.1935>